

Abstrak

Dalam melaksanakan penyitaan, tentunya Jurusita Pajak perlu mencari tahu aset apa saja yang dimiliki oleh penanggung pajak untuk mengetahui apakah nilai dari aset milik penanggung pajak mencukupi untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyitaan dan penelusuran aset yang dilakukan oleh Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur serta kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala selama pelaksanaan penyitaan dan penelusuran aset. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan Jurusita Pajak dan hasil observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data tindakan penagihan pajak selama tiga tahun terakhir. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan penyitaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan *Standard Operating Procedure* yang ada. Tindakan penyitaan dapat berjalan efektif dan efisien dengan adanya penelusuran aset milik penanggung pajak sebelum dilakukan penyitaan. Kendala yang dialami Jurusita Pajak berupa perlawanan dari penanggung pajak, penolakan pemasangan segel sita, aset milik penanggung pajak telah hilang atau beralih kepemilikan, serta aset tanah yang sulit ditentukan batas areanya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan mitigasi risiko melalui *Compliance Risk Management* dan meminta bantuan kepolisian untuk memberikan keamanan selama pelaksanaan penyitaan. Jurusita pajak juga dapat menuntut atas beralihnya kepemilikan aset apabila dilakukan dengan itikad tidak baik. Selain itu Jurusita Pajak dapat melakukan alternatif lain dengan mencari aset lain yang dapat disita.

Kata kunci: penyitaan, penanggung pajak, penelusuran aset.

Abstract

In carrying out the confiscation, of course, the tax bailiff needs to find out what assets are owned by the tax bearer to find out whether the value of the tax bearer's assets is sufficient to serve as collateral for paying off the tax debt. This study was conducted to analyze how the implementation of confiscation and tracking of assets was carried out by the tax bailiff at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur as well as the obstacles and efforts made to overcome obstacles during the implementation of asset confiscation and tracing. This research was conducted with a qualitative approach, where the primary data used were data from interviews with the tax bailiff and observations in the field. While the secondary data used is data on tax collection actions for the last three years. The result of this research is that

the implementation of the confiscation has been carried out by the existing tax laws and *Standard Operating Procedures*. The confiscation action can be carried out effectively and efficiently by tracing the assets belonging to the tax bearer before the confiscation is carried out. Constraints experienced by the tax bailiff are resistance from the tax bearer, refusal to install the confiscation seal, assets belonging to the tax bearer have been lost or have changed ownership, and land assets are difficult to determine the boundaries of the area. Meanwhile, efforts are being made to overcome these obstacles, namely by mitigating risks through *Compliance Risk Management* and asking the police for assistance to provide security during the implementation of the confiscation. Tax bailiffs can also sue for the transfer of ownership of assets if it is done in bad faith. In addition, the tax bailiff can do other alternatives by looking for other assets that can be confiscated.

Keywords: confiscation, tax bearer, asset tracing